

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN UNTER IWES KABUPATEN SUMBAWA

Agus Wahyudi

Universitas Teknologi Sumbawa

aguswahyudistiesia@gmail.com

Rr. Sri Pancawati M.

Universitas Mataram

pancawati_unram@yahoo.com

Nurabiah

Universitas Mataram

nurabiah_unram@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa memberikan dampak yang besar, di mana desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini juga di ikuti dengan keluarnya Permendagri. No. 113/2014 tentang Pengelolaan keuangan desa dan Perbup. No. 12/2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam bekerja. Penelitian ini juga di dasari oleh adanya pernyataan salah satu kepala desa yang berada di wilayah Kecamatan Unter Iwes bahwa masih dibutuhkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa khususnya bagian penatausahaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa-desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Pengelolaan keuangan desa yang dimaksud pada penelitian ini ialah tahapan pengelolaan keuangan desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini ialah aparatur desa yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa yakni berjumlah 56 sampel. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui hasil kuesioner dan divalidasikan oleh hasil wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis kuantitatif yang dilakukan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan desa pada desa-desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sudah berjalan dengan baik. Dimana hasil kuesioner telah menunjukkan keadaan yang sangat baik, begitu juga dengan hasil wawancara yang telah menunjukkan keadaan yang sangat baik dan hasil dokumentasian telah menunjukkan sebagian besar desa mampu memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti serta dokumen tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun ada juga desa yang tidak mampu menunjukkan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi kepada pemerintah desa agar dapat mengelola keuangan desa dengan lebih akuntabel dalam bekerja dan melakukan tertib administrasi dalam bekerja.

Kata-kata kunci: akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa

VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY OF UNTER IWES DISTRICT IN SUMBAWA REGENCY

ABSTRACT

Act No. 6/2014 of the village have a large impact, where villagers have greater authority in financial management. It is also followed by the release of regulation of the minister of home affairs No. 113/2014 on the financial management of the village and regulation of regent of Sumbawa Regency No. 12/2015 on guidelines for the financial management of the village which is expected to help the government in the village work. This study is also in the underlying by the statement of one of the heads of villages in the subdistrict of Unter Iwes that still required an understanding of the financial management of the village especially the administration. Therefore, this study aimed to analyze the accountability of financial management of villages in villages in the subdistrict of Unter Iwes Sumbawa Regency. Village financial management referred to in this research is the village financial management stages include: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. This type of research used in this research is descriptive quantitative research. The sample in this study is the village officials who have the duty and authority in the village financial management amounted to 56 samples. The data in this study were collected through a questionnaire and the results are validated by the results of interviews and documentation. Based on the quantitative analysis conducted on all aspects of planning, implementation, administration, reporting, and accountability for the conclusion that the financial management of villages in villages in the subdistrict of Unter Iwes Sumbawa already well underway. Where the results of the questionnaire have shown very good condition, as well as with the results of interviews have shown very good condition and results documentation have shown most of the village was able to provide the documents needed by researchers and it complies with the rules, but there are also villagers who were unable to show the documents required by the researcher. The results of this study contribute to the village in order to manage the finances of the village with more accountable in their work and orderly conduct administrative work.

Key words: accountability, village financial management

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan dampak yang besar, di mana desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran. Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Dana Desa (DD). Dengan adanya dana desa ini membuat jumlah pendapatan desa semakin meningkat, sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban yang baik. Sejalan dengan hal tersebut menteri dalam negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri.) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pendapatan desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan, dan kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki, dituntut untuk dilakukan secara transparansi dalam memberikan informasi, partisipatif untuk terlibat, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Tata kelola yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Bentuk pertanggungjawaban publik oleh pemerintah salah satunya ialah akuntabilitas hukum dan peraturan. Di mana akuntabilitas hukum dan peraturan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dilaksanakan akuntabilitas hukum dan peraturan oleh pemerintah daerah, maka perlu dilakukan audit kepatuhan (Mardiasmo, 2002:226). Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan (sujarweni, 2015). Jadi pemerintah desa diharapkan bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak diberi informasi, didengar aspirasinya, dan diberi penjelasan.

Permendagri. Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegritas antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

Menindaklanjuti Permendagri. No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 43, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengeluarkan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten

yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa memiliki luas wilayah 8.493 km² dengan jumlah penduduk sekitar 415.000 jiwa. Dengan memiliki 156

desa dan 8 kelurahan (sumbawakab.go.id). Kas desa di Kabupaten Sumbawa semakin membengkak pada Tahun 2016 ini, pasalnya Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN yang diterima pemerintah desa kian berlipat jika dibandingkan Tahun 2015 yang hanya Rp 45 Miliar. Untuk tahun 2016 pemerintah pusat akan mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa mencapai Rp 101 Miliar. Artinya ada kenaikan dua kali lipat, sehingga jumlah pendapat desa menjadi meningkat sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban yang baik. Bukan hanya Dana Desa (DD) yang perlu dipertanggungjawabkan namun semua komponen yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dipertanggungjawabkan.

Dalam hal pengalokasian Dana Desa (DD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengeluarkan Peraturan Bupati Sumbawa No. 60 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (DD) setiap desa di Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2016 pasal 3 menjelaskan bahwa dalam hal pembagian dan penetapan Dana Desa (DD) dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa serta dialokasikan secara merata dan berkeadilan. Besarnya Dana Desa (DD) tersebut membuat para pengelola keuangan desa rawan untuk melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Bukan hanya dana desa saja yang rawan dalam penyimpangan pengelolaannya, dana yang lainpun dapat membuat para pengelola keuangan desa rawan melakukan penyimpangan terhadap pengelolaannya. Di mana pada tahun 2016 telah terjadi demonstrasi masyarakat Desa Bugis Medang, Kecamatan Labuhan Badas dan masyarakat Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat yang melaporkan Kepala Desanya ke Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Polres Sumbawa, atas kasus penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa mereka dan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan (beritasumbawa.net). Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan diperlukan partisipatif, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam musyawarah desa, pemerintah desa diwajibkan terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. Prinsip transparansi akan terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD (Romantis, 2015). Begitu juga dengan pengelolaan keuangan desa harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, di mana pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan dana yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kasus di Kecamatan Labuhan Badas dan Kecamatan Alas Barat diharapkan desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa dapat bekerja secara berhati-hati diantaranya ialah desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Unter Iwes. Desa-desa yang berada di Kecamatan Unter Iwes juga mendapatkan kucuran Dana Desa. Kecamatan Unter Iwes merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Sumbawa, kecamatan ini terbentuk pada tahun 2003, dibandingkan Kecamatan Labuhan Badas dan Kecamatan Alas Barat yang telah terlebih dahulu terbentuk pada tahun 1999. Kecamatan

Unter Iwes memiliki 8 Desa. Dana Desa yang diterima untuk tahun anggaran 2016 diwilayah Kecamatan Unter Iwes mencapai Rp 5.041.555.000. Dengan besarnya dana yang diberikan ke desa-

desa yang berada di Kecamatan Unter Iwes, akan membuat semua aparatur desa bekerja sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yakni berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun sesuai dengan pernyataan salah satu Kepala Desa yang berada di wilayah Kecamatan Unter Iwes yakni Suraiman Kepala Desa Uma Beringin, menyatakan bahwa masih dibutuhkan pemahaman yang lebih luas tentang pengelolaan keuangan desa khususnya bagian penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa. Di mana bendahara desa yang dimiliki berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas jurusan ilmu pengetahuan alam, sehingga dibutuhkan pelatihan yang mendalam tentang hal pengelolaan keuangan desa. Selama ini bendahara desa masih melakukan pencatatan secara manual, kemudian menginput data yang dicatatnya secara manual ke komputer desa menggunakan *microsoft excel*.

Disamping itu juga, aparat desa juga harus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, agar terhindar dari hal-hal yang akan berpotensi timbulnya korupsi. Sesuai dengan pernyataan Yujana (2016) dalam seminarnya tentang peran strategis aparat desa dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset desa dan badan usaha milik desa (penguatan aparat desa se-Kabupaten Lombok Barat NTB), menyatakan bahwa potensi korupsi dalam tahap penyaluran/pengelolaan dana/aset desa sering terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penyaluran dan pengelolaan dana serta pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi antara lain *elit capture*, nepotisme, rawan *mark-up*, tidak adanya transparansi, rekayasa pelaporan, korupsi, serta tidak dilakukan dengan swakelola serta melibatkan partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu antara lain Subroto (2009), Astuty dan Fanida (2012), Faridahh dan suryono (2015), Irma (2015), Romantis (2015), dan wida (2016), sebagian besar hanya menyoroti pengelolaan keuangan desa dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan dalam penelitian ini selain tiga tahapan tersebut, peneliti juga ingin mengeksplorasi dari tahapan penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga mengacu pada kasus-kasus yang terjadi pada dua desa yakni desa Bugis Medang dan desa Usar Mapin di mana dalam kasus tersebut dibutuhkan transparansi, akuntabilitas dan partisipatif yang jelas dan tegas agar terhindar dari potensi korupsi seperti yang dikemukakan oleh Yujana (2016). Dari adanya kasus tersebut diharapkan bagi aparatur desa-desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes dalam melakukan pengelolaan keuangan desa lebih berhati-hati dan mampu mengawasi diri sendiri.

Dari hal-hal tersebut peneliti ingin mengeksplorasi tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa tahun 2016 baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban.

2. LANDASAN TEORI

2.1. STEWARDSHIP THEORY

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991 dalam Wahida, 2015), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principals* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih mampu dan siap. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

Implikasi *stewardship theory* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (manajemen) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

2.2. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawab kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo, 2002:24). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban publik oleh pemerintah salah satunya ialah akuntabilitas hukum dan

peraturan. Akuntabilitas hukum dan peraturan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dilaksanakannya akuntabilitas hukum dan peraturan oleh pemerintah daerah, maka perlu dilakukan audit kepatuhan (compliance audit) (Mardiasmo, 2002:226).

2.3. *DESA*

Menurut hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

2.4. *KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA*

Menurut Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam Perbu. No. 12 Tahun 2015 tersebut dijelaskan juga wewenang Kepala Desa, tugas Sekretaris Desa, tugas Kepala Seksi, dan tugas bendahara yang terdapat pada pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (2), dan pasal 7 ayat (2).

2.5. *KOMPONEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati Sumbawa No. 12 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa komponen anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

2.6. TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa tahapan yakni: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

3. METODE PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN, POPULASI, DAN SAMPEL

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif sedangkan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari hasil kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang berada di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Sampel dalam penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*.

Tabel 1
Kriteria Sampel

No.	Keterangan	Sampel
1	Aparat desa yang berada di wilayah Kecamatan Unter Iwes	358
2	Aparat desa yang tidak memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan Unter Iwes	(302)
3	Aparat desa yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan Unter Iwes	56

Sumber: data diolah (2016)

3.2. DEFINISI OPERASIONAL

1. Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyusunan rancangan peraturan desa yang melibatkan unsur pemerintah desa dan unsur masyarakat yang kemudian disusun oleh sekretaris desa yang kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD, kemudian dievaluasi oleh bupati dan terakhir penetapan APBDes oleh kepala desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penggunaan keuangan desa berupa pengeluaran dan penerimaan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang disertai dengan bukti yang lengkap dan sah berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai ketaatan bendahara desa dalam melakukan penyusunan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank serta mempertanggungjawabkan uang yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai ketaatan kepala desa dalam melakukan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan anggaran kepada Bupati/Walikota yang berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dimaksud penelitian ini adalah mengenai ketaatan kepala desa dalam melakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban reaslisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat tiap akhir tahun anggaran serta menginformasikannya kepada masyarakat.

3.3. PROSEDUR ANALISIS

Untuk hasil kuesioner prosedur analisisnya meliputi:

1. Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan correlated product moment dengan taraf signifikan 5%. Jika r hitung lebih besar dari r tabel ($r_h > r_{\text{tabel}}$) dan bernilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2005:42) jika nilai cronbach alpha $> 0,60$ maka instrumen dikatakan reliabel.

3. Statistik Diskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:206). Langkah-langkah dalam analisis data yang didapat dari hasil kuesioner pada analisis statistik diskriptif ialah dengan cara misalnya dalam tahap perencanaan ialah dengan cara:

a. Misalnya untuk satu pernyataan

Responden satu desa = 6 orang

Responden satu kecamatan 6 orang x 8 desa = 48 orang

Selanjutnya menentukan skor ideal yakni dengan cara:

= skor skala x jumlah pernyataan x jumlah responden

Kemudian mengklasifikasikan hasil tabulasi kuesioner dari 48 orang tersebut, misalnya:

- 20 orang menjawab sangat baik
- 18 orang menjawab baik
- 7 orang menjawab tidak baik
- 3 orang menjawab sangat tidak baik

b. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skor yang telah ditetapkan dan dapat dihitung sebagai berikut:

- Jumlah skor untuk 20 orang menjawab sangat baik = $20 \times 4 = 80$

- Jumlah skor untuk 18 orang menjawab baik $= 18 \times 3 = 54$

• Jumlah skor untuk 7 orang menjawab tidak baik $= 7 \times 2 = 14$

• Jumlah skor untuk 3 orang menjawab sangat tidak baik $= 3 \times 1 = 3$

Jumlah total $= 151$

c. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 48 responden maka 151 terletak pada daerah sangat baik dikarenakan jumlah total tersebut masuk ke dalam skor ideal sangat baik (jumlah skor ideal untuk satu item $= 4 \times 48 = 192$, seandainya semuanya menjawab sangat baik). Begitu juga analisi data yang dilakukan pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Setelah mendapatkan hasil perhitungan dari tabulasi data yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang disebarkan ke responden, tahapan selanjutnya ialah menjelaskan kembali dalam bentuk diskriptif hasil perhitungan dari tabulasi data dengan menambahkan hasil wawancara dan dokumentasi sebagai pemvalidasian hasil kuesioner serta memberikan nilai berdasarkan tabel 2

Tabel 2

Kriteria Hasil Wawancara dan Dokumentasi

Persentase	Keputusan
0% - 25%	Sangat Tidak Baik
26% - 50%	Tidak Baik
51% - 75%	Baik
76% - 100%	Sangat Baik

Sumber: data diolah, 2017

4. HASIL

4.1. GAMBARAN LOKASI DAN RESPONDEN PENELITIAN

Salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa ialah Kecamatan Unter Iwes dengan jarak dari ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan berjarak 2 km. Kecamatan Unter Iwes memiliki luas sebesar 82,38 km², jumlah penduduk 19.321 jiwa dan terdiri dari 8 desa yakni Desa Pelat, Desa Kerekeh, Desa Boak, Desa Jorok, Desa Kerato, Desa Pungka, Desa Uma Beringin, dan Desa Nijang. Tahun 2017 merupakan tahun ke 3 dalam hal pengimplementasian Peraturan Bupati Sumbawa tersebut, di mana peraturan tersebut diharapkan perangkat desa dapat bekerja secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan tersebut diharapkan agar pemerintah desa bekerja secara baik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Bendahara Desa, dan Ketua BPD yang ada di wilayah Kecamatan Unter Iwes. Responden tersebut dipilih karena mempunyai tugas dan tanggung jawab secara langsung atas pengelolaan keuangan desa dibandingkan dengan perangkat desa yang lain. Data yang

diolah merupakan data primer menggunakan kuesioner dengan waktu penyebaran yaitu tanggal 23 Februari sampai 9 Maret 2017. Kuesiner yang dapat diolah berjumlah 56 kuesiner.

4.2. *DISKRIPSI RESPONDEN*

1. Tingkat Pendidikan

Dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat pendidikan aparatur desa yang menjadi responden adalah SMA, di mana terdapat 43 orang atau 76,8% dari jumlah keseluruhan responden. Selanjutnya diikuti oleh aparatur desa dengan tingkat pendidikan Sarjana S-1 sebesar 11 orang atau 19,6% dari jumlah seluruh aparatur desa. Terakhir jumlah aparatur desa dengan karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 2 orang atau 3,6% dari jumlah keseluruhan responden. Dengan demikian, apabila dilihat dari tingkat pendidikan, aparatur desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa memiliki tingkat pendidikan yang memadai sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 3 menyatakan bahwa seorang calon kepala desa berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat dan Peraturan Daerah Sumbawa Nomor 26 tahun 2010 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa seorang sekretaris desa berpendidikan paling rendah adalah lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sedangkan perangkat desa lain berpendidikan paling rendah lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.

2. Lama Jabatan

Dapat diketahui bahwa sebagian besar responden mempunyai lama jabatan dalam bekerja <5 tahun, di mana terdapat 31 orang atau 55,4% dari jumlah keseluruhan responden. Responden yang mempunyai lama jabatan dalam bekerja antara 5 sampai 10 tahun yakni 13 orang atau 23,2% dan > 10 tahun terdapat 12 orang atau 21,4% dari jumlah keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat aparatur desa yang masih tergolong baru dalam bekerja, dimana aparatur desa ini masih membutuhkan pembinaan dan pendampingan.

4.3. *HASIL ANALISIS JAWABAN RESPONDEN*

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan pengujian validitas, menunjukkan bahwa koefisiensi korelasi/r hitung lebih besar dari r tabel dengan demikian seluruh pernyataan dapat disimpulkan valid. Begitu juga dengan pengujian reliabilitas yang menunjukkan bahwa cronbach alfa lebih besar dari

0,60 dengan demikian seluruh pernyataan dapat disimpulkan reliabel. Sehingga peneliti dapat melakukan tabulasi data hasil kuesioner.

2. Tabulasi Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan

Berdasarkan tabel 4 tersebut dapat disimpulkan bahwa total nilai dari variabel perencanaan dari keseluruhan responden adalah sebesar 2.622. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang berada di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sangat baik.

Tabel 3

Skor Ideal untuk Variabel Perencanaan

Skor Skala	Jumlah Pernyataan	Jumlah Responden	Skor Ideal	Interval	Keputusan
1	14	56	784	0 - 784	Sangat Tidak Baik
2	14	56	1.568	785 - 1.568	Tidak Baik
3	14	56	2.352	1.569 - 2.352	Baik
4	14	56	3.136	2.353 - 3.136	Sangat Baik

Sumber: data diolah, 2017

Tabel 4

Hasil Analisis Jawaban Responden untuk Variabel Perencanaan

Frekuensi														Jumlah Frekuensi	Skor Skala	Total Skor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	3	-	-	5	-	-	4	-	2	3	5	1	1	24	2	48
35	32	39	31	35	35	41	37	38	40	34	36	42	31	506	3	1.518
21	21	17	35	16	21	15	15	18	14	19	15	13	24	264	4	1.056
Total																2.622
Keputusan																Sangat Baik

Sumber: data diolah, 2017

Dalam penelitian ini hasil kuesioner juga divalidasi oleh hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara dan dokumentasi dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5
Hasil Wawancara dan Dokumentasi dalam Tahap Perencanaan

No.	Item Wawancara	Item Dokumen	Desa															
			Boak		Jorok		Kerato		Kerekeh		Nijang		Pelat		Pungka		Uma Beringin	
			Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dimulai dari tingkat dusun, serta melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, dan masyarakat	Daftar kehadiran musrenbang desa	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	
2	Melalui musrenbang pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat menyampaikan aspirasinya	Berita acara musrenbang	√	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	-
3	Rancangan perdes tentang APBDesa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD	Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)	√	√	-	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	-	-	
		Rancangan APBDesa	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-		
4	Rancangan perdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, disampaikan kepada bupati melalui camat untuk di evaluasi	Rancangan APBDesa	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	
		APBDesa	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	
Persentase			100%	60%	100%	0%	100%	80%	100%	40%	100%	100%	100%	20%	100%	60%	100%	0%

Sumber: data diolah, 2017

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner terlihat bahwa pengelolaan keuangan desa di desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa dalam tahapan perencanaan sudah berjalan dengan sangat baik. Dimulai dari penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa hingga penetapan peraturan desa tentang APBDDesa. Hasil kuesioner ini divalidasikan dengan hasil wawancara dan dokumentasi (lihat tabel 5). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam tahapan perencanaan sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa dalam hal perencanaan pemerintah desa telah melibatkan BPD dan unsur masyarakat dalam hal penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan RAPBDesa. Setelah itu sekretaris desa membuat rancangan APBDDesa berdasarkan hasil RPJMDesa dan RKPDesa. Rancangan APBDDesa yang telah disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD selanjutnya dievaluasi oleh bupati, setelah itu pemerintah desa memperbaiki hasil evaluasi dan kemudian rancangan APBDDesa yang telah diperbaiki ditetapkan menjadi APBDDesa berdasarkan peraturan desa. Hasil dokumentasipun sudah terlihat dengan sangat baik di mana pemerintah desa dapat menunjukkan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti seperti Desa Kerato dan Desa Nijang yang dapat menunjukkan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dan dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terdapat desa yang masuk ke dalam kategori baik yakni Desa Boak dan Desa Pungka karena masih terdapat kekurangan dalam menunjukkan dokumen tetapi sebagian besar dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dapat diperlihatkan ke peneliti. Dalam hal pendokumentasian terdapat juga desa yang masuk ke dalam kategori tidak baik yakni Desa Kerekeh dan kategori sangat tidak baik yakni Desa Jorok, Desa Pelat, dan Desa Uma Beringin, dikarenakan aparat desa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dibutuhkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan hasil kuesioner, wawancara, dan sebagian besar hasil pendokumentasian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang digunakan yakni *stewardship theory*, di mana teori ini menggambarkan situasi para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan publik perlu diutamakan dari pada kepentingan individu. Pemerintah desa yang berada di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa selalu melakukan musyawarah dalam hal pengambilan keputusan serta mendengar aspirasi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara umum tanpa mementingkan kepentingan individu

Pasal 80 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Hal ini mewajibkan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat, dan APBD Kabupaten/Kota. Undang-Undang tersebut diikuti oleh Permendagri. No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Perbup. Sumbawa No. 12 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa dan menyampikan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD. Kemudian dievaluasi oleh bupati melalui camat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2009), Astuty dan Fanida (2012), Faridah dan Suryono (2015), Irma (2015), Romantis (2015), dan Wida (2016) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa khususnya alokasi dana desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Sap dan Amin (2012) menyatakan bahwa masih kurang baik di mana masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.

b. Pelaksanaan

Dari tabel 7 dapat disimpulkan bahwa total nilai dari keseluruhan responden adalah sebesar 3.407 hal ini menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sangat baik.

Tabel 6

Skor Ideal untuk Variabel Pelaksanaan

Skor Skala	Jumlah Pernyataan	Jumlah Responden	Skor Ideal	Interval	Keputusan
1	18	56	1.008	0 - 1.008	Sangat Tidak Baik
2	18	56	2.016	1.009 - 2.016	Tidak Baik
3	18	56	3.024	2.017 - 3.024	Baik
4	18	56	4.032	3.025 - 4. 032	Sangat Baik

Sumber: data diolah, 2017

Tabel 7

Hasil Analisis Jawaban Responden untuk Variabel Pelaksanaan

Frekuensi																		Jumlah Frekuensi	Skor Skala	Total Skor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	1	2	2	6	-	-	-	1	-	9	1	-	1	-	-	-	24	2	48
30	27	26	32	33	34	37	31	32	34	31	35	34	28	33	30	37	33	577	3	1.731
26	28	29	22	21	16	19	25	24	21	25	12	21	28	22	26	19	23	407	4	1.628
Total																				3.407
Keputusan																				Sangat Baik

Sumber: data diolah, 2017

Dalam penelitian ini hasil kuesioner juga divalidasi oleh hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara dan dokumentasi dalam tahap pelaksanaan dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8
Hasil Wawancara dan Dokumentasi Dalam Tahap Pelaksanaan

No.	Item Wawancara	Item Dokumen	Desa															
			Boak		Jorok		Kerato		Kerekeh		Nijang		Pelat		Pungka		Uma Beringin	
			Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen
1	Kepala seksi membuat rencana anggaran biaya, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab, dan lampiran bukti transaksi, serta di verifikasi oleh sekretaris desa dan diketahui oleh kepala desa	Rencana Anggaran Biaya		-		√		√		√		√		-		√		√
		Surat Permintaan Pembayaran		-		√		√		√		√		-		√		√
		Pernyataan Tanggungjawab Belanja	√	-	√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√
		Bukti Transaksi		-		√		-		√		√		-		√		√
2	Kepala seksi melaporkan dan berkordinasi kepada sekretaris desa dan kepala desa atas kegiatan yang dilakukannya	Buku Kas Pembantu Kegiatan	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√
3	Pemerintah desa melakukan pengutan sebagai penerimaan desa sesuai dengan peraturan desa yang ditetapkan	Peraturan desa tentang jenis dan tarif pungutan desa	√	-	√	-	√	√	√	-	√	√	√	-	√	-	√	-
4	Perubahan perdes tentang APBDesa hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran	Perdes tentang perubahan APBDesa	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Persentase			100%	14%	100%	71%	100%	57%	100%	57%	100%	100%	100%	14%	100%	86%	100%	86%

Sumber: data diolah, 2017

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioer terlihat bahwa pengelolaan keuangan desa di desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa dalam tahapan pelaksanaan sudah berjalan dengan sangat baik. Dimulai dari kepala seksi membuat rancangan anggaran biaya hingga pelaporan dan koordinasi kepada sekretaris desa dan kepala desa atas kegiatan yang dilakukannya.

Hasil kuesioner juga divalidasikan oleh hasil wawancara dan dokumentasi (lihat tabel 8). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam tahapan pelaksanaan sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana kepala seksi telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, hal ini berdasarkan pernyataan kepala seksi bahwa dalam melakukan kegiatan kepala seksi wajib membuat rancangan anggaran biaya, pernyataan tanggung jawab belanja, surat permintaan pembayaran, buku kas pembantu kegiatan dan melampirkan bukti transaksi yang dibutuhkan itu semua diverifikasikan oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa serta terdapatnya dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti di mana desa-desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sudah menunjukkan keadaan yang sangat baik seperti Desa Nijang, Desa Pungka, Desa Uma Beringin yang dapat menunjukkan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan untuk Desa Jorok, Desa Kerato, dan Desa Kerekeh masuk ke dalam kategori baik dikarenakan sebagian besar dokumen dapat di dokumentasikan oleh peneliti. Namun terdapat desa yang masuk ke dalam kategori sangat tidak baik, yakni Desa Boak dan Desa Pelat dikarenakan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti tidak dapat diperlihatkan kepada peneliti. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan hasil kuesioner, wawancara, dan sebagian besar hasil pendokumentasian.

Sejalan dengan *stewardship theory*, di mana teori ini menegaskan bahwa eksistensi pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *steward* (manajemen) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifitas pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas. Tahapan pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa didukung juga oleh teori akuntabilitas seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:225) agar pengelolaan dana masyarakat yang sangat besar tersebut dilaksanakan secara transparan dengan memperhatikan *value for money*, maka diperlukan pelaksanaan dan pemeriksaan yang lebih konkrit dan tegas. Hal ini juga mewajibkan sekretaris desa selalu memverifikasi data yang akan di tanda tangani oleh sekretaris desa

maupun kepala desa, dikarenakan sekretaris desa memiliki peran sebagai kordinator pejabat teknis pengelola keuangan desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 81 menegaskan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Undang-Undang tersebut diikuti oleh Permendagri. No. 113 Tahun

2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Perbup. Sumbawa No. 12 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa penyusunan RKPDesa memuat tentang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini diharapkan seluruh pendapatan desa dapat digunakan sebaik mungkin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2009), Sap dan Amin (2012), Faridah dan Suryono (2015), Irma (2015), Nafidah dan Suryaningtyas (2015), Romantis (2015), dan Wida (2016) yang menunjukkan pengelolaan keuangan desa khususnya alokasi dana desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Meskipun hasil penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2009) baik namun dalam hal pelaksanaan terdapat kekurangan yakni aparatur desa yang belum melakukan pengadministrasian secara tertib dan sempurna. Sejalan dengan hasil penelitian subroto (2009), penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menemukan masih kurangnya tertib administrasi dalam hal pengelolaan keuangan desa pada desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.

c. Penatausahaan

Dari hasil tabel 10 tersebut dapat disimpulkan bahwa total nilai dari keseluruhan responden adalah sebesar 1.732. Hal ini menunjukkan bahwa tahap penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Sangat Baik.

Tabel 9
Skor Ideal untuk Variabel Penatausahaan

Skor Skala	Jumlah Pernyataan	Jumlah Responden	Skor Ideal	Interval	Keputusan
1	9	56	504	0 - 504	Sangat Tidak Baik
2	9	56	1.008	505 - 1.008	Tidak Baik
3	9	56	1.512	1.009 - 1.512	Baik
4	9	56	2.016	1.513 - 2.016	Sangat Baik

Sumber: data diolah, 2017

Tabel 10

Hasil Analisis Jawaban Responden untuk Variabel Penatausahaan

Frekuensi									Jumlah Frekuensi	Skor Skala	Total Skor
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	-	-	2	-	-	-	-	-	7	2	14
35	26	25	38	33	29	32	26	26	270	3	810
16	30	31	16	23	27	24	30	30	227	4	908
Total											1.732
Keputusan											Sangat Baik

Sumber: data diolah, 2017

Dalam penelitian ini hasil kuesioner juga divalidasiikan oleh hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara dan dokumentasi dalam tahap penatausahaan dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11

Hasil Wawancara dan Dokumentasi Dalam Tahap Penatausahaan

No.	Item Wawancara	Item Dokumen	Desa															
			Boak		Jorok		Kerato		Kerekeh		Nijang		Pelat		Pungka		Uma Beringin	
			Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen
1	Bendahara desa telah menjalankan tugasnya yakni menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabk an penerimaan dan pengeluaran desa	Buku Kas Umum		-		√		√		√		√		√		√		√
		Buku Kas Pembantu Pajak	√	-	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	
		Buku Bank		-		√		√		√		√		√				
Persentase			100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: data diolah 2017

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner terlihat bahwa pengelolaan keuangan desa di desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa dalam tahapan penatausahaan sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana bendahara desa telah mengerti dan memahami cara pembuatan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Hasil kuesioner juga di validasikan oleh hasil wawancara dan dokumentasi (lihat tabel 11). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam tahapan penatausahaan sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana bendahara desa telah mengerti cara pembuatan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank, namun masih menggunakan aplikasi sederhana yakni microsoft excel. Hasil dokumentasi juga menunjukkan sebagian besar desa-desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sudah berjalan dengan sangat baik seperti Desa Jorok, Desa Kerato, Desa Kerekeh, Desa Pelat, Desa Pungka, dan Desa Uma Beringin di mana bendahara desa telah menunjukkan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dan terdapat satu desa yang masuk ke dalam kategori baik yakni Desa Nijang dikarenakan dokumen yang diperlihatkan hanya dua dari tiga dokumen yang dibutuhkan. Namun ada juga desa yang masuk ke dalam kategori sangat tidak baik yakni Desa Boak, di mana desa ini tidak dapat menunjukkan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada tahapan penatausahaan sudah berjalan dengan baik, hal ini didukung dari hasil kuesioner, hasil wawancara dan sebagian besar desa-desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sudah menunjukkan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti.

Sejalan dengan pernyataan Mardiasmo (2002:226) bahwa akuntabilitas hukum dan peraturan adalah akuntabilitas terkait dengan jaminan adanya kepatuhan hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Di mana bendahara desa telah menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang ada, baik itu undang-undang maupun turunannya. Permendagri. No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Perbup. Sumbawa No. 12 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hal ini mewajibkan seorang bendahara desa bertanggungjawabkan uang yang dikelolanya.

d. Pelaporan

Dari hasil tabel 13 tersebut dapat disimpulkan bahwa total nilai dari keseluruhan responden adalah sebesar 566. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pelaporan yang

dilakukan oleh pemerintah desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sangat baik.

Tabel 12

Skor Ideal untuk Variabel Pelaporan

Skor Skala	Jumlah Pernyataan	Jumlah Responden	Skor Ideal	Interval	Keputusan
1	3	56	168	0 - 168	Sangat Tidak Baik
2	3	56	336	169 - 336	Tidak Baik
3	3	56	504	337 - 504	Baik
4	3	56	672	505 - 672	Sangat Baik

Sumber: data diolah, 2017

Tabel 13

Hasil Analisis Jawaban Responden untuk Variabel Pelaporan

Frekuensi			Jumlah Frekuensi	Skor Skala	Total Skor
1	2	3			
-	-	-	-	1	-
-	1	1	2	2	4
32	33	37	102	3	306
24	22	18	64	4	256
Total					566
Keputusan					Sangat Baik

Sumber: data diolah, 2017

Dalam penelitian ini hasil kuesioner juga divalidasikan oleh hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara dan dokumentasi dalam tahapan pelaporan dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14

Hasil Wawancara dan Dokumentasi Dalam Tahap Pelaporan

No.	Item Wawancara	Item Dokumen	Desa															
			Boak		Jorok		Kerato		Kerekeh		Nijang		Pelat		Pungka		Uma Beringin	
			Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen
1	Kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati	Laporan Semester Pertama	√	-	√	√	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√	√	
		Laporan Semester Akhir Tahun		√		-	-		√		√		√		√			
Persentase			100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	

Sumber: data diolah, 2017

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner terlihat bahwa pengelolaan keuangan desa di desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa dalam tahapan pelaporan sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Hasil kuesioner juga divalidasi oleh hasil wawancara dan dokumentasi (lihat tabel 14). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam tahapan pelaporan sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana kepala desa telah melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada SKPD terkait baik laporan semester pertama maupun laporan semester akhir tahun, namun hasil dokumentasi sebagian besar masuk ke dalam kategori tidak baik seperti Desa Boak, Desa Jorok, Desa Kerato, Desa Kerekeh, dan Desa Pelat yang hanya memperlihatkan satu dari dua dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan untuk Desa Nijang, Desa Pungka, dan Desa Uma Beringin sudah menunjukkan hal yang sangat baik karena dapat menunjukkan kedua dokumen yang dibutuhkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada tahapan penatausahaan sudah berjalan dengan baik, hal ini didukung dari hasil kuesioner, hasil wawancara dan sebagian besar desa-desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sudah menunjukkan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti.

Sejalan dengan teori yang digunakan di mana Mardiasmo (2002:24) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan tugas kepala desa dalam hal pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaporan yakni kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada SKPD terkait. Pelaporan ini menilai sejauh mana penggunaan pendapatan desa dibelanjakan. Pelaporan ini juga menjadi tolak ukur melihat tingkat penyerapan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga pemerintah daerah dapat mengevaluasi pekerjaan pemerintah desa secara cepat.

Sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota. Dalam Permendagri. No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Perbup. Sumbawa No. 12 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa diperjelas lagi bahwa kepala desa wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir semester dengan terbentuknya peraturan desa tentang laporan realisasi penggunaan anggaran semester pertama dan semester akhir tahun.

e. Pertanggungjawaban

Dari hasil tabel 16 tersebut dapat disimpulkan bahwa total nilai dari keseluruhan responden adalah sebesar 2.067. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sangat baik.

Tabel 15

Skor Ideal untuk Variabel Pertanggungjawaban

Skor Skala	Jumlah Pernyataan	Jumlah Responden	Skor Ideal	Interval	Keputusan
1	11	56	616	0 - 616	Sangat Tidak Baik
2	11	56	1.232	617 - 1.232	Tidak Baik
3	11	56	1.848	1.233 - 1.848	Baik
4	11	56	2.464	1.849 - 2.464	Sangat Baik

Sumber: data diolah, 2017

Tabel 16

Hasil Analisis Jawaban Responden untuk Variabel Pertanggungjawaban

Frekuensi											Jumlah Frekuensi	Skor Skala	Total Skor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	-	-	1	-	2	1	-	4	-	9	2	18
34	39	37	33	31	34	33	35	38	37	28	379	3	1.137
22	16	19	23	24	22	21	20	18	15	28	228	4	912
Total													2.067
Keputusan													Sangat Baik

Sumber: data diolah, 2017

Dalam penelitian ini hasil kuesioner juga divalidasikan oleh hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara dan dokumentasi dalam tahap pertanggungjawaban dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17

Hasil Wawancara dan Dokumentasi Dalam Tahapan Pertanggungjawaban

No.	Item Wawancara	Item Dokumen	Desa															
			Boak		Jorok		Kerato		Kerekeh		Nijang		Pelat		Pungka		Uma Beringin	
			Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen	Wawancara	Dokumen
1	Kepala desa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, BPD, dan masyarakat	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa		√		-		√		-		√		√		√		√
		Laporan Kekayaan Milik Desa	√	√	√	-	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Laporan Tentang Program Sektoral dan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Desa		-		-		√		-		√		√		√		√
Persentase			100%	67%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: data diolah, 2017

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner terlihat bahwa pengelolaan keuangan desa di desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa dalam tahapan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan sangat baik. Hasil kuesiner juga di validasikan oleh hasil wawancara dan dokumentas (lihat tabel 17). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam tahapan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran. Dalam hal pertanggungjawaban pemerintah desa melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, BPD, dan masyarakat. Selaras dengan hasil wawancara, hasil dokumentasi juga menunjukkan hal yang sangat baik juga di mana pemerintah desa dapat menunjukkan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti seperti Desa Kerato, Desa Nijang, Desa Pelat, Desa Pungka, dan Desa Uma Beringin dan ada juga desa yang masuk ke dalam kategori baik yakni Desa Boak karena hanya dapat menunjukkan dua dari tiga dokumen yang dibutuhkan. Namun ada juga desa yang tidak dapat menunjukkan dokumen yang dibutuhkan dan masuk kedalam kategori sangat tidak baik seperti Desa Jorok dan Desa Kerekeh. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada tahap pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik, hal ini didukung oleh hasil kuesioner, hasil wawancara dan hasil pendokumentasian yang sebagian besar aparatur desa dapat menunjukkannya.

Sejalan dengan hasil penelitian ini, *stewardship theory* juga menegaskan bahwa pemilik sumber daya (*principals*) mempercayakan pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward*) yang lebih mampu dan siap. Di mana eksistensinya pemerintah daerah menyerahkan otonomi daerah kepada pemerintah desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, pemerintah desa tetap melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 27 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa kepala desa wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati dan walikota. Kepala desa juga memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran serta memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sap dan Amin (2012), Faridah dan Suryono (2015), Irma (2015), dan Romantis (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa khususnya alokasi dana desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah berjalan dengan baik. Namun penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2009), Sap dan Amin (2012) yang menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas secara bertahap sudah mulai diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN

5.1. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jenis dan sumber data yang digunakan ialah data deskriptif kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner dan divalidasi oleh hasil wawancara dan dokumentasi dengan jumlah sampel sebanyak 56 sampel. Sampel dalam penelitian ini yakni aparatur desa yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan analisis kuantitatif yang dilakukan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan desa pada desa-desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sudah berjalan dengan baik. Dimana hasil kuesioner telah menunjukkan keadaan yang sangat baik, begitu juga dengan hasil wawancara yang telah menunjukkan keadaan yang sangat baik dan hasil dokumentasi telah menunjukkan sebagian besar desa mampu memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti serta dokumen tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun ada juga desa yang tidak mampu menunjukkan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti.

5.2. IMPLIKASI PENELITIAN

Hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi teoritis, praktis dan kebijakan.

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan implikasi yang luas mengenai *stewardship theory* dalam memberikan pemahaman yang luas mengenai hubungan antara manajemen dan pemilik sumber daya yang digambarkan melalui tindakan penyampaian laporan realisasi penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat dengan tepat waktu, serta meningkatkan kepercayaan pemerintah daerah dan masyarakat kepada pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga diharapkan mampu mendukung prinsip akuntabilitas pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengambil keputusan dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi pihak pemerintah desa agar dapat mengelola keuangan desa dengan lebih akuntabel dalam bekerja dan melakukan tertib administrasi agar mempermudah pemerintah desa dalam bekerja. Penelitian ini juga

memberikan implikasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk lebih terlibat dalam menilai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga dapat mengambil keputusan dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Secara kebijakan, penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi pemerintah desa dalam memberikan masukan dan pertimbangan dalam hal pengelolaan keuangan desa. Terutama terkait dengan aplikasi sistem keuangan desa, karena selama ini pemerintah desa dalam hal penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa masih menggunakan aplikasi sederhana yakni *Ms. Word* dan *Ms. Excel*. Maka dari itu peneliti menyarankan kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai aplikasi sistem keuangan desa kepada pemerintah desa agar mempermudah mereka dalam bekerja.

5.3. KETERBATASAN DAN SARAN

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dapat memberi arah bagi pemerintah desa di wilayah Kecamatan Unter Iwes, pemerintah daerah di Kabupaten Sumbawa dan penelitian mendatang. Pertama, dalam hal pengelolaan keuangan desa masih terdapat aparatur desa yang belum melakukan tertib administrasi. Diharapkan aparatur desa dapat melakukan tertib administrasi secara baik.

Kedua, masih terdapat aparatur desa yang belum memaksimalkan penggunaan teknologi seperti komputer di kantor desa, proses penyusunan laporan keuangan desa masih menggunakan aplikasi yang sederhana yaitu menggunakan *word* dan *excel*. Diharapkan pemerintah desa dapat memanfaatkan penggunaan teknologi seperti komputer semaksimal mungkin agar mempermudah mereka dalam berkerja. Diharapkan juga pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan dan sosialisasi dalam hal pengelolaan keuangan desa kepada aparatur desa khususnya aplikasi sistem keuangan desa.

Ketiga, penelitian ini hanya melihat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa saja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dari aspek yang lain misalnya menilai aspek efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Keempat, penelitian ini hanya meneliti desa-desa yang berada di satu kecamatan dimana penelitian ini hanya mengambil sampel yakni desa-desa yang berada di Kecamatan unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Peneliti selanjutnya dapat meneliti keseluruhan desa di Kabupaten Sumbawa untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sumbawa.

Daftar Pustaka

- Astuty, Elgia dan Eva Hany Fanida. 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Faridah dan Bambang Suryono. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4. No. 5*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Gozhali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irma, Ade. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, hal 121-137*. Universitas Tadulako.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. _____, 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Indonesia: Andi Offset.
- Nafidah, Lina Nasihatun dan Mawar Suryaningtyas. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol.3 No. 1*. STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Daerah Sumbawa No 26 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Romantis, Ainurrohman. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Sap, Zulpisar dan Raja Muhammad Amin. 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal*. Universitas Riau.
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis*. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Indonesia. Alfabeta.
- Wahidah. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Wida, Siti Ainul. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Yujana, Hendry. 2016. Modul Peran Strategis Aparat Desa Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset Desa dan BUMDesa (Penguatan Aparatur Desa se-Kabupaten Lombok Barat, NTB).
- www.beritasumbawa.net (diakses tanggal 25 Desember 2016)
- www.kemenkeu.go.id (diakses tanggal 10 April 2017)
- www.sumbawakab.go.id (diakses tanggal 7 Desember 2016)